



SEMINAR NASIONAL & FOCUS GROUP DISCUSSION
“MENAGIH KOMITMEN PEMERINTAH”
MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL



Jln. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia 55183
Telp. 0274-387656, Fax. 0274-387648. Email: pk2p_fhummy@ymail.com

SEMINAR NASIONAL & FOCUS GROUP DISCUSSION
“MENAGIH KOMITMEN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KEADILAN
SOSIAL”

Yogyakarta, Selasa - Rabu, 17 - 18 Juli 2018

A. Dasar Pemikiran

Pancasila merupakan *filosofische grondslag*, *commons platforms* dan *kalimatun sawa*. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*) berfungsi sebagai cita-cita atau *idea* yang semestinya harus selalu diusahakan untuk dicapai oleh tiap-tiap manusia Indonesia sehingga cita-cita itu dapat terwujud. Pancasila sebagai dasar negara (*filosofische grondslag*) merupakan landasan dan panduan dasar dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Pancasila adalah pedoman sekaligus filter yang membingkai penyelenggaraan negara dan perkembangan masyarakat. Sila-sila Pancasila merupakan bangunan piramida yang menjadi panduan dalam segala pelaksanaan aktivitas negara dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah panduan dalam kegiatan ekonomi, politik, hukum, agama, dan lainnya. Dalam kehidupan demokrasi, basis penyelenggaraan demokrasi adalah Sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Pelaksanaan demokrasi berada dalam kerangka orientasi etis hikmah-kebijaksanaan, demokrasi direalisasikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai-nilai persatuan (kekeluargaan) dan keadilan. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dianggap benar jika memenuhi setidaknya empat syarat, yaitu: *pertama*, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektifitas ideologis dan kepentingan; *kedua*, didedikasikan untuk kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan; *ketiga*, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif); *keempat*, bersifat imparisial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Sila ke-4 ini berpasangan dengan sila ke-5, ibarat dua sisi dari keping mata uang, bila Sila ke-4 mengandung prinsip “demokrasi politik”, Sila ke-5 mengandung prinsip “demokrasi ekonomi”. Keduanya merefleksikan hasrat bangsa Indonesia untuk beremansipasi dari penindasan politik ekonomi penjajahan dengan memuliakan daulat rakyat melalui pemberdayaan partisipasi warga dibidang politik dan ekonomi. Cita-cita keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir dari revolusi Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi melalui pengembangan dan penintegrasian pranata kebijakan ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan.

Namun implementasi Demokrasi Pancasila sangat dipengaruhi oleh kondisi kestabilan negara dan pemerintahan, baik masa orde lama, orde baru, hingga reformasi. Laju perkembangan demokrasi Pancasila hingga saat ini merupakan bentuk pencarian konsep ideal formulasi demokrasi Pancasila yang realisasinya harus menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai-nilai persatuan (kekeluargaan) dan keadilan. Pencarian konsep ideal ini merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan. Indonesia berkemajuan mengandung makna bahwa adanya suatu pemikiran yang mendasar dan mengandung rekonstruksi yang bermakna dalam kehidupan kebangsaan bagi terwujudnya cita-cita Negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan bangsa dan negara lain. Berkemajuan mengandung



SEMINAR NASIONAL & FOCUS GROUP DISCUSSION
“MENAGIH KOMITMEN PEMERINTAH”
MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL



Jln. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia 55183
Telp. 0274-387656, Fax. 0274-387648. Email: pk2p_fhummy@ymail.com

arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi unggul. Indonesia berkemajuan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila, cita-cita Proklamasi dan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang berbasis pada nilai kebaikan, keadilan, kemakmuran dan keberadaban.

Mewujudkan Indonesia berkemajuan sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945 bukanlah hal yang mudah, mengingat akhir-akhir ini munculnya tantangan yang secara tidak langsung menguji kesaktian “Pancasila” di era demoktasi kekinian dengan berbagai peristiwa munculnya gerakan radikalisme, pembubaran ormas, ditambah dengan persoalan pelembagaan Pancasila oleh lembaga negara dan pembudayaan Pancasila ditengah masyarakat sangatlah lemah, dan persoalan lainnya. Untuk itulah diperlukan penguatan demokrasi Pancasila sebagai syarat utama mewujudkan Indonesia berkemajuan.

B. Tujuan

Seminar nasional ini bertujuan untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran para akademisi dan peneliti untuk mendiskusikan dan mempresentasikan isu-isu strategis berkaitan dengan demokrasi Pancasila menuju Indonesia berkemajuan. Seminar ini akan menghasilkan sebuah alternatif pemikiran untuk para presenter dan peserta seminar melalui sharing pengalaman, pengetahuan, dan ide-ide terbaru.

C. Seminar Nasional dan *Focus Group Discussion*

Seminar Nasional dan FGD “Penguatan Demokrasi Pancasila Menuju Indonesia Berkemajuan diselenggarakan selama dua hari di Ruang Seminar E6 Gedung Ibrahim, Kampus terpadu UMY. Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

➤ Seminar Nasional

Seminar Nasional ini menghadirkan narasumber dengan tema sebagai berikut:

1. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, **Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.H.**: “Peran Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Demokrasi Pancasila”
2. Pakar Politik Universitas Indonesia **Prof. Dr. Rocky Gerung**: “Peran Partai Politik dalam Penguatan Demokrasi Pancasila”
3. Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila **Yudi Latif, M.A., Ph.D.**, “Strategi Implementasi Pancasila Melalui Penguatan Kedaulatan Ekonomi Rakyat”
4. Pakar Ekonomi **Dr. Kwik Kian Gie** : “Membongkar Akar Ketidakadilan Sosial Ekonomi di Indonesia”
5. Pakar Hukum Tata Negara dan Demokrasi FH UMY, **Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D** : “Penataan Lembaga Peradilan dan Implementasi Rule of Law di Indonesia”.

➤ *Focus Group Discussion*

“Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat”

Narasumber : UKP PIP

Peserta : Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, Pemerintah Daerah, dan Peserta *Call for Papers* Semnas dari seluruh Indonesia.

➤ *Call for Papers*

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan topik *Call for Papers* terkait dengan Penguatan Demokrasi Pancasila menuju Indonesia Berkemajuan, dalam perspektif:

1. Kepemimpinan Nasional.
2. Agama dan Peradaban.



SEMINAR NASIONAL & FOCUS GROUP DISCUSSION
“MENAGIH KOMITMEN PEMERINTAH”
MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL



Jln. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia 55183
Telp. 0274-387656, Fax. 0274-387648. Email: pk2p_fhummy@gmail.com

3. Hukum.
4. Budaya.
5. Sosial dan Politik.
6. Pertahanan dan Keamanan.

B. Ketentuan Pendaftaran

1. Pendaftaran dan penyerahan makalah *full papers* 1 Maret - 31 Mei 2018.
2. Calon peserta *call papers* mengirimkan makalah dengan memilih salah satu sub-tema tersebut di atas.
3. Makalah terpilih akan diumumkan pada tanggal 7 Juni 2018 melalui website resmi PK2P FH UMY (law.umy.ac.id)
4. Makalah narasumber dan makalah terpilih diterbitkan dalam satu buku elektronik (e-book) ber-ISBN.
5. Bagi yang tidak lolos dalam seleksi sebagai peserta *call papers*, dapat menjadi peserta *non call for paper* dalam kegiatan seminar nasional.

D. Tanggal-tanggal Penting

Tanggal-tanggal Penting	
Pengumuman Seminar Nasional dan <i>Call for Papers</i>	1 Maret 2018
Batas Akhir Pengiriman <i>Full Paper</i>	31 Mei 2018
Pengumuman Paper yang diterima	7 Juni 2018
Pendaftaran Seminar Nasional	1 Maret – 1 Juli 2018
Seminar Nasional	17 - 18 Juli 2018
Presentasi Paper	17 Juli 2018

E. Biaya Seminar Nasional dan *Call for Papers*

Peserta	Biaya	Fasilitas
Peserta Seminar dan <i>Call for Paper</i>	350.000,--	Sertifikat, Seminar Kit, Snack-Lunch, Makalah, Buku ber-ISBN (khusus Peserta Call for Paper)
Peserta Seminar (Mahasiswa S1 Non UMY)	75.000,--	
Peserta Seminar (Mahasiswa S2)	100.000,--	
Peserta Seminar (Mahasiswa S3 dan Umum)	200.000,--	

Pembiayaan tersebut mohon dikirim ke:

Bank BRI Cabang Sleman
No. Rek: 0247-01-022251-50-8
an. PK2P FH UMY

Mohon scan bukti pembayaran dikirimkan ke email: pk2p_fhummy@gmail.com

F. Manual Acara

Hari	Pukul	Acara
Selasa, 17 Juli 2018	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta
	08.00 - 08.15	Pembukaan ➤ Sambutan Rektor UMY Dr. Gunawan Budiarto, S.P.
	08.15 - 09.30	Keynote Speech ➤ Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.H. (Peran Organisasi Masyarakat dalam Penguatan Demokrasi Pancasila)



SEMINAR NASIONAL & FOCUS GROUP DISCUSSION
“MENAGIH KOMITMEN PEMERINTAH”
MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL



Jln. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia 55183
Telp. 0274-387656, Fax. 0274-387648. Email: pk2p_fhummy@gmail.com

	09.30 – 10.00	Coffee break
	09.30 - 12.00	Seminar Nasional <ul style="list-style-type: none">➤ Mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Dien Syamsuddin (Penguatan Demokrasi Pancasila menuju Indonesia berkemajuan dan Berkeadilan)➤ Pakar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof.Dr. Rocky Gerung (Peran Partai Politik dalam Penguatan Demokrasi Pancasila)➤ Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif, M.A., Ph.D (Strategi Implementasi Pancasila Melalui Penguatan Kedaulatan Ekonomi Rakyat)➤ Pakar Ekonomi Dr. Kwik Kian Gie (Membongkar Akar Ketidakadilan Sosial Ekonomi di Indonesia)➤ Pakar Hukum Tata Negara dan Demokrasi FH UMY Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D (Penataan Lembaga Peradilan dan Implementasi Rule of Law di Indonesia) Moderator: Nasrullah, S.Ag., S.H., M.CL
	12.00 - 13.00	Ishoma
	13.00 - 14.30	Parallel Group Discussion <ol style="list-style-type: none">1. Kepemimpinan Nasional.2. Agama dan Peradaban.3. Hukum.4. Budaya.5. Sosial dan Politik.6. Pertahanan dan Keamanan.
	14.30-14.45	Coffea break
	14.45 - 16.00	Parallel Group Discussion <ol style="list-style-type: none">1. Kepemimpinan Nasional.2. Agama dan Peradaban.3. Hukum.4. Budaya.5. Sosial dan Politik.6. Pertahanan dan Keamanan.
Rabu, 18 Juli 2018	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta
	08.00 -11.30	Focus Group Discussion “Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat”
	11.30-12.00	Penutupan oleh Dekan FH UMY Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

G. Pedoman Penulisan

- Ruang lingkup dan topik *Call for Papers* terkait dengan Penguatan Demokrasi Pancasila menuju Indonesia Berkemajuan, dalam perspektif:
 1. Kepemimpinan Nasional.
 2. Agama dan Peradaban.
 3. Hukum.
 4. Budaya.
 5. Sosial dan Politik.
 6. Pertahanan dan Keamanan.
- **Ketentuan Penulisan**
 1. Judul ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*center*);
 2. Nama lengkap penulis tanpa gelar dan instansi
 3. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - a. Judul;
 - b. Nama lengkap penulis;
 - c. Pendahuluan;



SEMINAR NASIONAL & FOCUS GROUP DISCUSSION
“MENAGIH KOMITMEN PEMERINTAH”
MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL



Jln. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia 55183
Telp. 0274-387656, Fax. 0274-387648. Email: pk2p_fhumy@ymail.com

- d. Pembahasan (Sub judul sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - e. Penutup (Kesimpulan dan Saran);
 - f. Daftar Pustaka.
4. Menggunakan ukuran A4, margin: atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2.5 cm;
 5. Panjang naskah antara 4.000 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk catatan kaki (*footnote*), spasi 1, huruf Time News Roman ukuran 12;
 6. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 11 poin. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks.
 7. Ketentuan Penulisan footnote
Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.20
Moh, Jamin, dalam “Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2005, hlm.20
 8. Daftar Pustaka ditulis sesuai urutan abjad. Contoh:
 - a. Jimly Asshiddiqie, 2005. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
 - b. Moh, Jamin., 2005. “Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2005, Jakarta: Mahkamah Konsitusi.
 - c. Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
 9. Makalah dilengkapi dengan Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur: nama lengkap dengan gelar akademik, tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik.